

JURNAL
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN SANKSI
PIDANA BAGI PECANDU NARKOBA RESIDIVIS
(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
HIMAWAN SETIAJI
115010107111042



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi :DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN SANKSI PIDANA BAGI PECANDU
NARKOBA RESIDIVIS**

(Studi Di Pengadilan Negeri Malang)

Identitas Penulis :

- a. Nama : Himawan Setiaji**
- b. NIM : 115010107111042**
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana**

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 08 September 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.

NIP. 19590126 198701 1 002

Eny Harjati S.H., M.Hum.

NIP. 19590406198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum.

NIP. 19590406 198601 2 001

RINGKASAN

Himawan Setiaji, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2015, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN SANKSI PIDANA BAGI PECANDU NARKOBA RESIDIVIS (Studi Di Pengadilan Negeri Malang), Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Eny Hardjati, S.H., M.Hum.

Pada skripsi ini penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi pecandu narkoba residivis yang ada di kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi dengan maraknya kasus pecandu narkoba residivis khususnya yang ada di Kota Malang. Terkait dengan hal ini tujuan penulis yakni untuk mengathui dan mendeskripsikan tentang pertimbangan hakim dalam menangani kasus pecandu narkoba residivis.

Dalam rangka mengetahui kendala penegak hukum khususnya hakim terhadap tindak pidana pecandu residivis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Melalui pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Malang dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara kepada hakim yang menangani kasus tindak pidana pecandu narkoba residivis di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari dokumen dan putusan hakim Pengadilan Negeri Malang. Kemudian penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana yakni aspek yuridis dan aspek non yuridis. Aspek yuridis didasarkan pada faktor-faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan penemuan barang bukti, sedangkan aspek non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Dalam hal lain penulis menemukan kendala dalam hakim memberikan pertimbangan pada kasus tindak pidana pecandu narkoba residivis yakni kendala yuridis, kendala teknis dan kendala struktur. Kendala yuridis yakni hakim berhak memilih undang-undang mana yang akan dipakai ataupun pasal mana yang akan dipakai secara tegas mengenai hukuman yang dibebankan pada pecandu narkoba residivis apabila bersalah. Sedangkan kendala teknis yakni kendala ini timbul karena lembaga rehabilitasi tidak dapat mengontrol terpidana yang telah menjalani pengobatan atau perawatan (biaya mahal). Kemudian terkait dengan kendala struktur yakni kendala ini muncul karena tidak adanya koordinasi para aparat penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga rehabilitasi.

SUMMARY

Himawan Setiaji, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in January 2015, BASIC CONSIDERATIONS FOR DETERMINING THE COURT OF CRIMINAL SANCTIONS FOR RECIDIVIST DRUG ADDICTS (Study In Malang District Court), Abdul Madjid, SH, M. Hum., Eny Hardjati, SH, M. Hum.

In this paper the author discusses the judge consideration in determining criminal sanction for recidivists drug addicts in the city of Malang. This is motivated by the rampant cases of recidivists, especially drug addicts in the city of Malang. Related to this is the author's purpose for mengathui and describe the consideration of judges in handling cases of drug addicts recidivists.

In order to understand the constraints of the law enforcement especially judges against recidivists criminal offense addict, then the type of research is empirical legal research. Through juridical sociological research approach. This research was conducted in the District Court of Malang with primary data obtained through interviews to the judge who handles criminal cases recidivists drug addicts in Malang District Court. While secondary data is obtained from the document author and Malang District Court judge's ruling. Then the author uses descriptive qualitative technique.

Based on the research results, related to the basic consideration of the judge in determining the criminal sanction which juridical and non juridical aspects. Juridical aspects are based on factors contained in the hearing of the public prosecutor's indictment, statements of witnesses, testimony of the defendant and the discovery of evidence, while the non-judicial aspects are based on impact factor defendant and defendant's condition yourself. In another case the authors find obstacles in the judge to give consideration to the criminal cases that recidivists drug addicts juridical constraints, technical constraints and structural constraints. Juridical constraints that the judge is entitled to choose which laws to be used or where the article will be used explicitly about the sentences imposed on drug addicts recidivists if convicted. While the technical constraints that arise because of this constraint can not control the rehabilitation institute convict who had undergone treatment or care (expensive cost). Then the structure of the constraints associated with this constraint appears because of the absence of coordination between police law enforcement personnel, prosecutors, courts and rehabilitation institution

A. Pendahuluan

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹ Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.² Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-

¹ Pasal 1 ayat 8 KUHP

² Pasal 16 ayat 1 UU No.4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman

keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.³

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur mengenai pasal pengedaran narkoba yang dilanggar dan Pasal 144 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang residivis narkoba, faktor psikologis-sosiologis residivis dan faktor pertimbangan di luar Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdiri dari serius atau tidaknya modus operandi yang dilakukan, jumlah barang yang di edarkan, dan hal-hal yang dapat memperberat dan meringankan hukuman residivis atau dengan perkataan lain erat kaitannya dengan faktor subyektif hakim.⁴ Oleh karena pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana itu melalui suatu proses yang panjang, perlu diketahui faktor-faktor apakah yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis yang melakukan bandar narkoba dan dasar hukum yang melandasi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis yang melakukan bandar narkoba.⁵

Pada kasus pecandu narkoba residivis yang terjadi di wilayah Malang pada tahun 2011 Nomor perkara 304/PID.SUS/2011 dengan terdakwa yang bernama Feri Eko Iswahyudi di *Vonis* selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 2.000.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan oleh Hakim. Selain itu, di wilayah Malang juga terdapat kasus yang sama dengan Nomor perkara

³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, **Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana**, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 16.

⁴ Sri Sutatiek, **Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadilkan Memutuskan Perkara**, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2013, hal 79.

⁵ **Ibid** hal. 176

441/PID.SUS/2011 yang bernama Muhamad Dul Manap di *Vonis* hakim selama 8 tahun 6 bulan penjara dan denda 800.000.000,00 subsidier 3 bulan.⁶ Hal itu terjadi karena seorang Hakim memiliki suatu pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara terhadap terdakwa. Begitu juga pada perkara pidana pecandu narkoba residivis misalnya melihat faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba dan dampak yang timbul akibat pengulangan tindak pidana narkoba tersebut, serta berbagai faktor pertimbangan lainnya yang mana antara satu kasus dengan kasus lainnya memiliki perbedaan. Pertimbangan itulah yang nantinya sebagai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan bagi seorang Hakim dalam memutuskan berat ringannya *Vonis* pada terdakwa pecandu narkoba residivis. Oleh karena faktor-faktor pertimbangan itulah *Vonis* yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Malang bervariasi pada setiap perkara tindak pidana pecandu narkoba residivis.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul :

“ DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN SANKSI PIDANA BAGI PECANDU NARKOBA RESIDIVIS “ Studi di Pengadilan Negeri Malang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Harini selaku Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Narkoba Residivis, pada tanggal 13 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB.

- A. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi pecandu narkoba residivis ?
- B. Apa yang menjadi kendala hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi pecandu narkoba residivis ?

C. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi pecandu narkoba residivis

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yaitu bahwa penulis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.⁷ Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Serta difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Malang adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan adalah:⁸

1. Latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu kondisi sosial yang berpengaruh pada cara pandangnya.

⁷ Ibid, hal 44

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Harini selaku Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Narkoba Residivis, pada tanggal 13 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB.

2. Profesionalisme, yaitu pengetahuan, wawasan, keahlian, dan keterampilan.

3. Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada.

Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia di atur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.

4. Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Malang, Ibu Harini berpendapat bahwa penyalahgunaan tindak pidana narkoba residivis merupakan hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba. Tingkah laku terdakwa di muka sidang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan jika terdakwa bersikap arogan.

5. Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.⁹

Selain faktor eksternal, seorang hakim pengadilan negeri malang juga memiliki beberapa faktor internal yang mempengaruhi dalam mempertimbangkan suatu putusan, antara lain:¹⁰

1. Individu yang terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan atau depresi. Termasuk dalam aspek kepribadian, karena pribadi yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk kecemasan atau depresi, karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang.¹¹
2. Sikap perilaku yang *apriori*, yaitu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa adalah pihak yang bersalah oleh karena rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Wiyono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 14 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB

¹⁰ AL Wisnubroto, **Hakim dan Peradilan di Indonesia**, Atmajaya, Yogyakarta, 1997, hal.2

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Wiyono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 14 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB

3. Sikap perilaku emosional, yaitu sifat dasar hakim yang mempengaruhi hasil putusan.
4. Sikap *arrogance power*, yaitu sikap arogan hakim bila mereka dirinya paling berkuasa dan pintar juga mempengaruhi hasil putusan.
5. Moral, yaitu banteng pribadi hakim dalam cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Seorang hakim juga dalam menentukan sanksi pidana memiliki dasar pertimbangan secara yuridis dan non yuridis.¹² Pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian. Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba residivis hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sanusi selaku Kepala Bidang Pidana Umum di Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 15 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB

putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis dengan cara hakim melihat dari sisi dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa.¹³

2. Kendala Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Pecandu Narkoba Residivis

Dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pecandu narkoba residivis terdapat beberapa kendala:¹⁴

1. Kendala Yuridis

Hakim berhak memilih Undang-undang mana yang akan dipakai ataupun pasal mana yang akan dipakai secara tegas mengenai hukuman yang dibebankan kepada pecandu narkoba apabila bersalah.

Maka dari hal ini hakim bisa berasumsi bebas dalam menentukan undang-undang yang dapat dipakai didalam merumuskan tindak pidana narkoba. Hakim berasumsi bahwa dengan dipidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan pecandu dapat menerima perawatan rehabilitasi dan akan sembuh atau berubah menjadi seseorang yang lebih baik.

2. Kendala Teknis.

- a. Berasal dari lembaga rehabilitasi, kendala ini timbul karena lembaga rehabilitasi tidak dapat mengontrol terpidana yang telah menjalani pengobatan dan atau perawatan, dan mengangap dalam sistem

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Sanusi selaku Kepala Bidang Pidana Umum di Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 15 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Harini selaku Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Narkoba Residivis, pada tanggal 13 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB

pemasyarakatan terdapat dokter yang merawat terpidana narkoba yang sudah menjadi pecandu.

- b. Lembaga rehabilitasi merupakan instansi yang dibiayai pemerintah sehingga dianggap lembaga yang membutuhkan dana yang besar (mahal).
- c. Berasal dari lingkungan keluarga kendala ini timbul karena keluarga tidak ada inisiatif melakukan perlawanan atau mengajukan oleh pengacaranya untuk mengajukan permohonan kepada hakim untuk meminta terdakwa untuk dilakukan perawatan rehabilitasi.

3. Kendala Struktur

Dalam hal ini kendala terjadi karena tidak adanya koordinasi para aparat penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan, lembaga rehabilitasi, karena apabila kepolisian sudah mengetahui tersangka seorang pecandu, mengapa di tahap penyidikan tersangka tidak dapat langsung direhabilitasi dan memberikan laporan ke kejaksaan bahwa tersangka ini seorang korban yang harus disembuhkan. Dari kejaksaan tidak adanya tuntutan terdakwa untuk menjalankan perawatan rehabilitasi yang mengganti masa pidana. Dari lembaga rehabilitasi tidak berperan aktif untuk memberikan laporan terhadap persidangan bahwa lembaga rehabilitasi tersebut siap untuk menerima terpidana pecandu narkoba untuk memberi perawatan. Ditambah lagi kendala hakim ialah dengan tidak adanya laporan dari hawasmats (hakim pengawas dan pengamat) tentang dampak negatif terhadap terpidana yang telah dipidana di lembaga pemasyarakatan. Karena tugas hawasmats memberikan pengawasan dan pengawamatan mengenai

hasil-hasil pembinaan narapidana dengan melihat dan menilai apakah sesuai dengan system pemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam menentukan sanksi pidana seorang hakim juga memiliki kendala. Kendala yang dialami seorang hakim diantara lain:¹⁵

- a. Adanya tekanan dari masyarakat terhadap seorang hakim.
- b. Hakim seringkali disebut sebagai profesi yang sangat tidak menjunjung kode etik.
- c. Masyarakat menganggap bahwa seorang hakim banyak mendapatkan suap sehingga dalam menentukan sanksi ada ketidakadilan.
- d. Masyarakat masih perlu sosialisasi yang mendalam akan pengertian proses rehabilitasi. Masyarakat menganggap bahwa rehabilitasi merupakan hukuman bebas bagi seorang terdakwa.

Hal ini yang menjadi kendala hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana narkoba residivis. Persepsi masyarakat bahwa keadilan selalu identik dengan kemenangan dapat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain:¹⁶

- a. Rendahnya mutu putusan hakim dimana pertimbangan tidak dapat menjelaskan secara rasional mengenai alasan yang digunakan, sehingga tidak dapat menyentuh rasa keadilan bagi para pihak yang berpekara.
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya para pihak yang berpekara yang memandang keadilan hanya sebatas pada nilai menang dan kalah.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Harini selaku Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Narkoba Residivis, pada tanggal 13 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Wiyono selaku Hakim di Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 14 Oktober 2014, pukul 10.00 WIB

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

- A. Putusan hakim terhadap menentukan sanksi pidana narkoba residivis tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama, ini disebut putusan disparitas dimana hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Penyebab terjadinya perbedaan dalam hasil putusan dengan perkara yang sama dapat berasal dari berbagai faktor. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Pecandu Narkoba Residivis adalah Latar belakang, *body language*, keadaan keluarga, pihak Internal dan eksternal.
- B. Kendala hakim dalam menentukan sanksi pidana pecandu narkoba residivis adalah stigma negatif masyarakat terhadap hakim. Seorang hakim seringkali mendapatkan tekanan dalam menentukan sanksi pidana yang dianggap tidak adil.

2. Saran

Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tampaknya masih belum cukup mampu menekan angka penyalahgunaan pecandu narkoba residivis. Hal ini merupakan refleksi dari belum memudahinya instrument hukum berikut implementasinya di lapangan. Seharusnya Negara memberikan peraturan hukum yang lebih tegas serta pembinaan baik secara

fisik maupun psikis, selain pranata hukum dengan sanksi tegas juga dalam tatanan implementasi.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum juga patut memberikan wawasan luas serta sosialisai kepada masyarakat mengenai sanksi pidana pecandu narkoba residivis, sehingga tidak akan ada lagi stigma negatif masyarakat terhadap seorang hakim. Hal ini sangat diperlukan adanya koordinasi yang baik antara pihak internal dan eksternal lembaga hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arrasjid, C, **Dasar-dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Medan, 2000.
- Bambang, W, **Penelitian Hukum dalam Prakter**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Harlina, L, **Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba**, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Kelsen, H, **Teori Hukum Murni**, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika**, UMM Press, Malang, 2009.
- Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009.
- Lisa, J., & Sutrisna, N, **Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan jiwa**, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Mulyadi, Lilik, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bhaktii, Bandung, 1996.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, & Moh. Zakky A.S., **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Moh. Taufik, dkk, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Najih, M, **Pengantar Ilmu Hukum**, Setara Press, Malang, 2012.

Ninieck, S, **Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Nawawi, B, **Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Nawawi, B, **Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Ronny Hanitojo Soemitro, **Metodelogi Penelitian Hukum**, Ghalia, Jakarta, 1990.

Rubai, Masruchin, **Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, IKIP, Malang, 2001.

Soejono, A, **Metode Penulisan Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

WJS. Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Yuti, D., & Putra, A, **Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana**, Alfabeta, Bandung, 2013.

AL.Wisnubroto, **Praktik Persidangan Pidana**, Yogyakarta, 2014

AL.Wisnubroto, **Hakim dan Peradilan di Indonesia**, Atmajaya, Yogyakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan :

Soesilo, R, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Politeie, Bogor, 1991.

Soesilo, R, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2013.

Sutatiek, S. Dr., Hj, **Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutuskan Perkara**, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2013.

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2009. **Tentang Kekuasaan Kehakiman**. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009. **Tentang Narkotika**. Yogyakarta: Laksana

Website :

www.pn-malang.go.id/index.php/2012-10-26-13-40-19/visi-dan-misi.html diakses pada tanggal 15 September 2014, pukul 10.00 WIB.

Badan Narkotika Nasional, Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia (online), <http://news.okezone.com/read/2014/01/23/337/930885/bnn-khawatir-dengan-jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia>, (16 Oktober 2014, pukul 08.00 WIB)